

LAPORAN KINERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

**DINAS PANGAN
TAHUN 2017**



**LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN
2017**

DAFTAR ISI

	hal.	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
BAB I : PENDAHULUAN		
A. Dasar Hukum	1	
B. Gambaran Umum Dinas Pangan Kabupaten Pasaman.....	2	
1. Struktur Organisasi	2	
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3	
3. Kepegawaian.....	6	
BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH		
A. Visi dan Misi	7	
B. Strategi dan arah kebijakan.....	11	
BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	14	
1. Target dan Realisasi.....	14	
2. Permasalahan dan solusi.....	14	
B. Pengelolaan Belanja daerah.....	14	
1. Target dan Realisasi.....	14	
2. Permasalahan dan Solusi.....	14	
BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
A. Program dan Kegiatan	15	
B. Realisasi Program dan Kegiatan.....	16	
C. Permasalahan dan Solusi.....	21	
BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN		
A. Tugas Perbantuan Yang diterima.....	24	
1. Dasar Hukum.....	24	
2. Instansi Pemberi Tugas Perbantuan.....	24	
3. Program dan Kegiatan.....	24	
4. Realisasi Pelaksanaan program.....	24	
5. Sumber dan Jumlah Dana.....	24	
6. Permasalahan dan Solusi.....	24	
B. Tugas Pembantuan Yang diberikan.....	24	
BAB VI : PENUTUP		25

DAFTAR TABEL

1. Daftar Nominatif Pegawai negeri pada Dinas Pangan Tahun 2017.....	6
2. Tujuan dan sasaran Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Tahun 2017 – 2021.....	9
3. Strategi dan Kebijakan.....	12
4. Anggaran dan Realisasi urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Dinas Pangan Tahun 2017.....	15
5. Pencapaian kinerja dan Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Tahun 2017.....	19
6. Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2017.....	20
7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan dasar Pangan Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	21

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pangan selama Tahun 2017, dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pangan

Disamping itu, laporan ini juga akan dapat menjadi pedoman atau bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, sebab dengan adanya laporan ini akan memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2017 dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan ditahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Ketrangan Pertanggung Jawaban Dinas Pangan Kabupaten Pasaman ini, disamping sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan kabupaten Pasaman Tahun 2017, juga sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dari Dinas Pangan untuk masa- masa yang akan datang

Lubuk sikaping, Januari 2018
Kepala Dinas Pangan
Kab. Pasaman



Ir. YUSPI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19630522 198903 1 007

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pangan akhir Tahun anggaran 2017 disusun dan disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015, yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pangan Akhir Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebagai berikut :

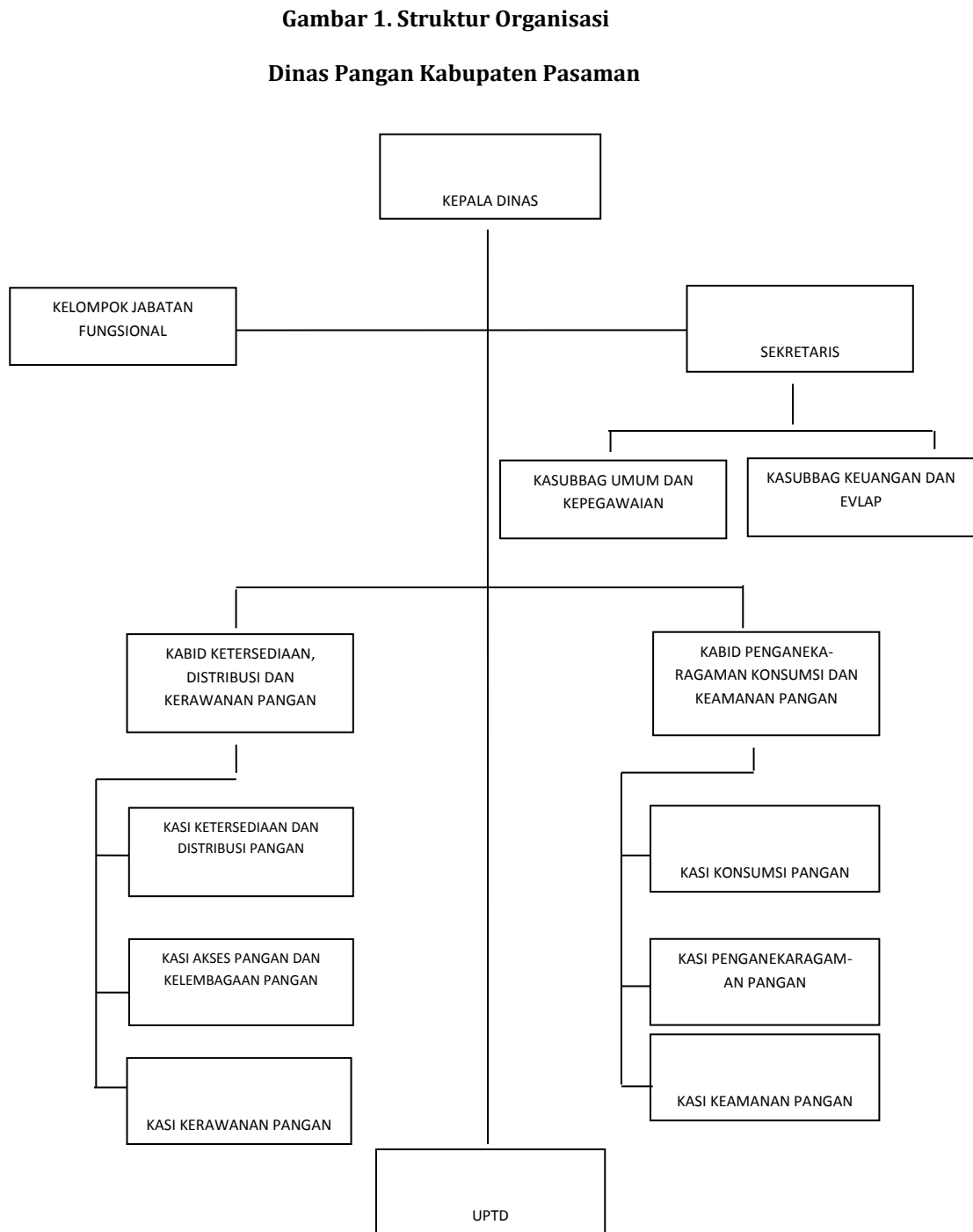
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Pasaman;
6. Surat Bupati Pasaman nomor : 050/783/Litbang/Bappeda-2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penyusunan laporan Keterangan Peratnggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasaman Akhir Tahun Anggaran 2017
7. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pasaman nomor : 526/122/DP/I-2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Tahun 2017 – 2021

Keberadaan Dinas Pangan Kabupaten Pasaman berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasaman nomor 50 Tahun 2016 sebagai satuan kerja yang dinilai cukup strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dalam bidang Pembangunan Ketahanan Pangan. Keberadaan Dinas Pangan sangat dibutuhkan dalam rangka Pembangunan Ketahanan Pangan yang lebih efektif dan efisien guna mewujudkan masyarakat Pasaman yang sejahtera, agamis dan berbudaya.

B. Gambaran Umum Dinas Pangan Kabupaten Pasaman

1. Struktur Organisasi

Dinas Pangan Kabupaten Pasaman memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Pasaman Nomor 50 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016, adalah sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pangan;
- Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. **Sekretariat** mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Melakukan pengelolaan program, evaluasi dan pelaporan, urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- Menyusun program kerja dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja urusan Dinas Pangan;
- Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas urusan Dinas Pangan;
- Pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pelaksanaan dan perumusan Rencana Stratejik;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan di dalam organisasi;

- Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan urusan pangan berdasarkan azas keseimbangan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

- c. **Bidang Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas; melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan, distribusi, kelembagaan dan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
- Pengkajian peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
- Pelaksanaan pembinaan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.
- Pengendalian dan pengawasan pasokan dan harga pangan;
- Koordinasi, monitoring, evaluasi, informasi dan promosi terhadap distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
- Penetapan harga referensi pangan;
- Penyediaan cadangan pangan;
- Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan atau pangan lainnya sesuai kebutuhan;
- Penyelenggaraan pengkajian program kerja pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pangan;

- Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pangan;
- Menyelenggarakan koordinasi pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pangan;
- Melaksanakan pengelolaan data pemberdayaan masyarakat;
- Menyelenggarakan fasilitasi usaha-usaha pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pangan;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Mengkoordinasikan dan mengaktifkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
- Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan, Distribusi, Kelembagaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari:

- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- b. Seksi Akses Pangan dan Kelembagaan Pangan
- c. Seksi Kerawanan Pangan
- d. **Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas; melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- Pengkajian pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
- Penyiapan perumusan kebijakan konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan kebijakan konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan segar.

Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Konsumsi Pangan

- b. Seksi Penganekaragaman Pangan
- c. Seksi Keamanan Pangan

3. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdapat 24 (Dua puluh empat) orang pegawai seperti tabel berikut :

Tabel 1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Pada
Dinas Pangan Tahun 2017

NO	NAMA TEMPAT/TGL LAHIR	NIP	GOL RUANG	PENDIDIKAN	Diklat yang Pernah diikuti
1	2	3	4	5	6
1	Ir.YUSPI B.Sangkar/22 Mei 1963	196305221989031007	IV/c	S1 Pertanian	
2	Ir.FURKAN SYAHRIAL Padang / 02 september 1964	196411021993032002	IV.B	S1 Pertanian	
3	DEWI LINDA, SP Batu Sangkar/ 25 Agustus 1963	196308251986032002	IV.a	S1 Pertanian	
4	TJATUR SUPRIADI, S.TP Pasaman/ 24 Maret 1973	197303242005011004	III.d	SI Pertanian	
5	EZY AMELIA EKA PUTRI,SP,MSi B.Tinggi/27-01-1975	197501271998032002	IV.a	S2 Magister Sains	
6	YANITA FITRI Salibawan / 15-01-1966	1966011511989032003	III.d	SMEA	
7	HASNETI, SE 50 Kota/ 15/10/1966	196610151989012001	III.d	S1 Manajemen Ekonomi	
8	Fitriani,S.Pt Padang mentinggi/5 Februari 1979	197902052005012008	III.d	S1 Peternakan	
9	NOVERI ILYAS,A.Md Lubuk Sikaping/14 - 11 - 1963	196311141987101001	III.d	DIII Pertanian	
10	SEPPI TRISMAWADI, SP Kauman/ 13 Desember 1979	197912132006041009	III.d	S1 Pertanian	
11	HASFIA YANTI Dangung-dangung/06 Juli 1964	196407061991032002	III.c	D.III Peternakan	
12	RISNA AFRIYANTI,SP Lubuk Sikaping/ 1 Desember 1983	198312012010012014	III.b	S1 Pertanian	
13	Drh. RUDHASTIA Jakarta/ 25-06-1960	196006251989032002	IV.c	S1 Dokter Hewan	
14	ITA WISIKARTIYAH,SP,MM Padang/16-04-1969	196904161994032008	IV.a	S2 Manajemen	
15	Efnizar,SP Limbanang, 2 januari 1963	196301021998032002	III.c	S1/2006 Pertanian	
16	HEDI MURDIAN L.Sikaping/17 Juli 1970	197007171993031004	III.b	SMEA -	
17	EFFI DARMAYETTI Bukittinggi/26-12-1962	196212261988032002	III/b	STM Pertanian	
18	IRSADI,SH Muaro Kiawai/ 10/26/1970	197010262007011003	III.b	SI Hukum	
19	YUNI ARTATIA,Md Padang/21 Juni 1980	198006212008012004	III.a	D.III Keuangan -	
20	ZULFIARNI,A.Md Pangian/17 Juli 1978	197807172010012013	II.d	D III Amik	
21	ERNIKAWATI Simpang/ 02 September 1987	198709022011012015	II/d	D III Akuntansi	

22	YULHENDRI Lubuk Sikaping, 27 Juli 1977	197707272007011012	II/c	SLTA	-	
23	FEBRIA NELLI Dalik/ 2 September 1984	198402092007012002	II.b	SMK Pertanian	-	
24	RONI ZAKIR YANTI Lubuk Sikaping/ 02 Februari 1976	197602022007012006	II.b	SPP	-	

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi, Misi dan Sasaran

1. Visi

Dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Pasaman, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mewujudkannya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan sektor pangan di Kabupaten Pasaman berangkat dari landasan visi :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat”

Visi Dinas Pangan Kabupaten Pasaman diatas mempunyai makna terwujudnya kemampuan Kabupaten Pasaman dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya baik secara kabupaten maupun perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. sebagai berikut:

2. MISI

Guna mewujudkan visi Dinas Pangan di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan.
2. Meningkatkan aksesibilitas pangan.
3. Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan.
4. Mewujudkan keamanan pangan.

3. TUJUAN

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Pangan Kabupaten Pasaman, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Pangan kedepan adalah sebagai berikut :

Tujuan Misi 1 (Meningkatkan ketersediaan pangan)

1. Meningkatnya ketersediaan bahan pangan pokok sesuai kebutuhan pangan masyarakat dan untuk antisipasi kerawanan pangan.

Tujuan Misi 2 (Meningkatkan aksesibilitas pangan)

1. Lancarnya distribusi pangan disetiap wilayah dengan harga terjangkau

Tujuan Misi 3 (Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan)

1. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis sumberdaya lokal.

Tujuan Misi 4 (Mewujudkan keamanan pangan)

1. Meningkatnya keamanan pangan segar

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Sasaran Misi 1 (Meningkatkan ketersediaan pangan)

1. Terpenuhinya ketersediaan pangan minimal terhadap energi dan protein.
2. Menurunnya tingkat kerawanan pangan

Sasaran Misi 2 (Meningkatkan aksesibilitas pangan)

2. Terpantaunya pasokan, harga dan akses pangan di daerah
3. Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen.
4. Berkembangnya kelembagaan pangan pemasok dan penyangga stabilitas harga pangan

Sasaran Misi 3 (Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan)

1. Meningkatnya kualitas dan keberagaman konsumsi masyarakat.
2. Menurunnya konsumsi beras masyarakat per tahun

Sasaran Misi 4 (Mewujudkan keamanan pangan)

1. Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat
2. Meningkatnya manajemen kinerja aparatur

Tabel 2.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Kabupaten Tahun 2017 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan pokok sesuai kebutuhan pangan masyarakat dan untuk antisipasi kerawanan pangan	Terpenuhinya ketersediaan pangan minimal terhadap energi dan protein serta ketersediaan pangan utama	a. Tingkat Ketersediaan Energi (minimal)	Kkal/kap/hr	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
			b. Tingkat Ketersediaan Protein (minimal)	Gr/kap/hr	63	63	63	63	63
		Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Penurunan Angka Kerawanan Pangan	%	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
2	Lancarnya distribusi pangan di setiap wilayah dengan harga terjangkau	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	Koefisien Keragaman harga pangan (CV) a. Beras b. Cabe merah	CV	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
					≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25

3	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis sumberdaya lokal	Meningkatnya kualitas dan keberagaman konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	78	81	83	85	87
4	Meningkatnya keamanan pangan segar	Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	Persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	%	76	77	78	79	80



B. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pangan Kabupaten Pasaman

1. Strategi

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan.
2. Mengembangkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas.
3. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan.
4. Melakukan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan di daerah.
5. Menjaga stabilitas harga pangan utama.
6. Melakukan upaya merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
7. Mendorong pengembangan pangan alternatif (non beras)
8. Meningkatkan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
9. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat.

2. Kebijakan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan pangan pemerintah dan masyarakat
2. Penguatan koordinasi antar dinas/instansi terkait penyediaan pangan
3. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat (lumbung pangan)
4. Penanganan daerah rawan pangan melalui bantuan bahan pangan dan pemberdayaan masyarakat
5. Pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan.
6. Peningkatan peranan lembaga pembeli gabah dan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat.
7. Peningkatan peran kelembagaan lokal dalam penyuluhan penganeekaragaman pangan dan gizi.
8. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganeekaragaman pangan melalui sosialisasi, demonstrasi dan lomba B2SA
9. Pengembangan dan penyediaan paket-paket teknoogi agroindustri skala pedesaan.
10. Pengkajian peluang pengembangan pangan alternatif sesuai potensi daerah
11. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan segar.
12. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pangan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3.
Strategi dan Kebijakan

Visi	Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi I	Meningkatkan ketersediaan pangan			
	1 Meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok sesuai kebutuhan pangan masyarakat dan untukantisipasi kerawanan pangan	1 Terpenuhinya ketersediaan pangan minimal terhadap energi dan protein serta ketersediaan pangan utama	1 Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan	1 Penguatan kelembagaan pangan pemerintah dan masyarakat
		2 Menurunnya tingkat kerawanan pangan	1 Mengembangkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas	2 Penguatan koordinasi antar dinas/instansi terkait penyediaan pangan
			2 Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan	1 Penguatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat (lambung pangan)
				1 Penanganan daerah rawan pangan melalui bantuan bahan pangan dan pemberdayaan masyarakat
Misi II	Mewujudkan aksesibilitas pangan			
	1 Lancarnya distribusi pangan di setiap wilayah dengan harga terjangkau	1 Stabilitasnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen.	1 Menjaga stabilitas harga pangan utama	1 Peningkatan peranan lembaga pembeli gabah dan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat
Misi III	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan			
	1 Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, seimbang dan aman) berbasis sumberdaya lokal	1 Meningkatkan kualitas dan keberagaman konsumsi masyarakat	1 Melakukan upaya merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman	1 Peningkatan peran kelembagaan lokal dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi

				<p>2 Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman pangan melalui sosialisasi, demonstrasi dan lomba B2SA</p> <p>3 Pengembangan dan penyediaan paket-paket teknologi agroindustri skala pedesaan</p>
MISI IV	Mewujudkan Keamanan Pangan			
	Meningkatnya 1 keamanan pangan segar	1 Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	1 Meningkatkan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat	1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang – undangan di bidang mutu dan keamanan pangan
			2 Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat	1 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan melalui sosialisasi dan penyuluhan



BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Target dan Realisasi

- Target : Rp. 17.440.000,-
- Realisasi : Rp. 19.705.500,- (112,99%)
- Sisa Lebih : Rp. 2.265.500,-

2. Permasalahan dan Solusi (NIHIL)

Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan pada Dinas Pangan Kab. Pasaman realisasinya telah melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pasaman (112,99%)

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi

a). Belanja Tidak Langsung

- Alokasi Anggaran : Rp. 3.492.262.175
- Realisasi Anggaran : Rp. 2.663.312.662,-
- Sisa Lebih Anggaran : Rp. 828.949.513,-

b). Belanja Langsung

- Alokasi Anggaran : Rp. 2.544.151.500,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 2.444.921.257,-
- Sisa Lebih Anggaran : Rp. 99.230.243,-

2. Permasalahan dan Solusi (NIHIL)

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2017 Dinas Pangan Kabupaten Pasaman melaksanakan 6 (enam) Program dan 21 Kegiatan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp. 2.544.151.500,-

Tabel 4
Anggaran dan Realisasi
Urusan Wajib Dinas Pangan Tahun 2017

No	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2	URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR			
2.03	Pangan			
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.1.1	Administrasi Perkantoran	255.518.100	215.721.012	95.66
1.1.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	144.995.500	141.270.204	97.43
1.1.3	Rapat dan Koordinasi	150.000.000	149.983.700	99,93
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1.2.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	46.400.000	45.700.000	98.49
1.2.2	Pembangunan Gedung Kantor	187.375.000	186.825.000	99.71
1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1.3.1	Pengadaan Pakaian Aparatur	10.800.000	10.800.000	100
1.4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1.4.1	Penyusunan Laporan SKPD	6.000.000	6.000.000	100
1.5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			
1.5.1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	47.985.500	47.598.170	99.19
1.5.2	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	8.010.000	1.575.750	19.67
1.5.3	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	229.150.000	228.298.800	99.63
1.5.4	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	335.900.830	384.888.830	96.57
1.5.5	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	247.800.000	238.755.500	96.35
1.5.6	Koordinasi Kebijakan Perberasan	140.198.500	129.523.886	92.39
1.5.7	Analisis Ketersediaan Pangan	43.807.400	40.876.580	93.31
1.5.8	Pameran Pangan Nusantara tk. Nasional	102.710.000	100.756.310	98.10
1.5.9	Penanganan dan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar	115.698.500	94.502.925	81.68
1.5.10	Diversifikasi Pangan	276.195.500	272.979.335	98.84
1.5.11	Jaringan Informasi Pasar	67.789.000	53.985.310	79.64
1.5.12	Data Base Ketahanan Pangan	33.420.000	33.382.760	99.89
1.5.13	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	57.310.000	57.242.185	99.88
2.3	Program Perencanaan Pembangunan daerah			
2.3.1	Penyusunan Renstra	4.425.000	4.345.000	98.19
	JUMLAH	2.544.151.500	2.444.921.257	96.10

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Dinas Pangan Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pangan telah diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Sebagai Leading Sector dalam pembangunan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Pasaman maka ada beberapa indikator kinerja dari Dinas Pangan seperti dibawah ini :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung Program ini adalah :

1. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan

Terlaksananya pendataan potensi daerah rawan pangan Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.47.958.500,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 47.598.170,- atau sebanyak 99.19 % dari dana yang dianggarkan.

2. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan beras cadangan pangan pemerintah ke daerah sebanyak 36.389 ton. Mengikuti apresiasi cadangan pangan di pusat serta mengantarkan beras cadangan pangan BKP Propinsi Sumatera Barat ke lokasi bencana alam. Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.8.010.000,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.1.575.750,- atau sebanyak 19,67% dari dana yang dianggarkan.

3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan dilakukan dalam 4 tahapan meliputi Tahap Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan, dan Kemandirian. Pembinaan dan pendampingan Kelompok Desa Mandiri Pangan (DMP) dilaksanakan pada 6 kelompok DMP. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pelatihan teknis pertanian yang merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan khususnya pemantapan ketahanan pangan. Untuk kegiatan ini melibatkan Tim Pangan Desa (TPD), penyuluh, kelompok kerja kabupaten dan Lembaga Keuangan Desa (LKD), sehingga dilaksanakan pembinaan pada TPD dan LKD serta penyusunan RUA/RUK. Kelompok DMP ini baru pada tahap penumbuhan dan tahap pengembangan. Untuk bantuan yang diserahkan kepada kelompok DMP untuk

optimalisasi lahan berupa pengadaan bantuan sarana produksi pertanian (ternak kambing dan obat-obatan). Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.229.150.000,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 228.298.800,- atau sebanyak 99,063 % dari dana yang dianggarkan

4. Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok Lumbung Pangan lama yang masih aktif. Pada kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi dan movev lumbung pangan tingkat kabupaten dan pengadaan konstruksi gudang dan lantai jemur lumbung pangan di Kecamatan serta pembelian kendaraan roda 3(tiga). Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.335.900.830,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 384.888.830,- atau sebanyak 96.57 % dari dana yang dianggarkan.

5. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien

Terlaksananya pembinaan ke Gapoktan pengelola kegiatan LDPM sebanyak 9 kelompok dan Tunda Jual sebanyak 8 kelompok. Pembinaan dilakukan dengan bentuk pertemuan-pertemuan dengan pengurus Gapoktan dan pengelola serta penyuluh pendamping yang ditunjuk agar kegiatan dalam pengelolaan dana LDPM dapat bergulir. Terlaksananya pengadaan konstruksi gudang RMU dan pengadaan alat-alat pengolahan pertanian/penggilingan padi. Terlaksananya perputaran modal usaha pengelolaan LDPM sebanyak 2 kali putaran dalam kurun waktu 12 bulan. Dampak dari kegiatan ini adalah terjadinya perputaran modal yang dilakukan oleh Gapoktan dalam kegiatan jual beli beras ditingkat petani. Terlaksananya ketersediaan cadangan pangan bagi anggota LDPM untuk menghadapi musim paceklik. Selain itu pencapaian kinerja sebanyak 100% ini dikarenakan teranggarkannya pendanaan untuk kegiatan cadangan pangan sehingga kelompok cadangan pangan yang telah memiliki gudang dapat membeli hasil panen anggota dan apabila musim panen kedua telah datang maka gabah/padi yang ada digudang dijual untuk membeli beras/gabah kembali. Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.247.800.000,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 238.755.500,- atau sebanyak 96.35% dari dana yang dianggarkan.

6. Koordinasi Kebijakan Perberasan

Terlaksananya kegiatan Demonstrasi pengolahan pangan lokal yang diikuti oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), Kader PKK, utusan DW Kabupaten dan organisasi wanita lainnya. Untuk kegiatan ini diarahkan kepada kegiatan panganekaragam pangan sehingga diharapkan ketergantungan terhadap beras dan terigu dapat dikurangi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang ada di sekitar. Untuk mensukseskan kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan Lomba

Cipta Menu Beragam, Bergizi dan Berimbang (3B) baik ditingkat kabupaten maupun tingkat propinsi serta dilaksanakan pertemuan Apresiasi Pola Pangan Harapan (PPH) dan kegiatan promosi pangan lokal tingkat propinsi. Pada kegiatan ini juga diikuti peringatan Hari pangan Sedunia (HPS) Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.140.198.500,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 129.523.886,- atau sebanyak 92.39% dari dana yang dianggarkan.

7. Analisa Ketersediaan Pangan

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kerjasama Instansi terkait berupa penyusunan Buku Analisa Ketersediaan Pangan berdasarkan NBM pada 12 kecamatan. Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.43.807.400,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.40.876.580,- atau sebanyak 93.31% dari dana yang dianggarkan.

8. Penanganan dan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui standar kualitas produk yang ditunjukkan dengan suatu lisensi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten sampai suatu produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Dengan kegiatan ini diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat akan standar mutu dan keamanan pangan melalui pelaksanaan kegiatan pengujian sampel bahan makanan olahan dan bahan makanan pangan segar (buah, sayur, hewan) dengan menggunakan rapid test kit. Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.115.698.500,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 94.502.925,- atau sebanyak 81.68 % dari dana yang dianggarkan.

9. Diversifikasi Pangan

Pada tahun anggaran 2017 dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pemanfaatan pekarangan melalui pembuatan kebun bibit sayuran percontohan pemanfaatan lahan pekarangan pada kelompok wanita tani, dasawisma dan kantor Dinas Pangan. Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.276.195.500,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 272.979.335,- atau sebanyak 98.84 % dari dana yang dianggarkan.

10. Penanganan dan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui standar kualitas produk yang ditunjukkan dengan suatu lisensi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten sampai suatu produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Dengan kegiatan ini diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat akan standar mutu dan keamanan pangan melalui pelaksanaan kegiatan pengujian sampel bahan makanan olahan dan bahan makanan pangan segar (buah, sayur,

hewan) dengan menggunakan rapid test kid. Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.102.075.000,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 62.698.100,- atau sebanyak 61,42% dari dana yang dianggarkan.

11. Jaringan Informasi Pasar

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui terjadinya fluktuasi terhadap harga pangan di masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pangan. Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.67.789.000,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 53.985.310,- atau sebanyak 79.64 % dari dana yang dianggarkan.

12. Data Base Ketahanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan BPS berupa penyusunan Buku Data Base Ketahanan Pangan pada 12 kecamatan. Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.33.420.000,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.33.382.760,- atau sebanyak 99.89 % dari dana yang dianggarkan.

13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi serta pembinaan ke Gapoktan pengelola kegiatan Kegiatan Ketahanan Pangan. Kegiatan evaluasi terakhir dilakukan dengan pengurus Kelompok Tani dan pengelola serta penyuluh pendamping dengan melakukan pertemuan yang dilaksanakan di aula Dinas Pangan. Untuk indikator kinerja ini dana yang dianggarkan adalah Rp.57.310.000,- dan dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 57.242.000,- atau sebanyak 99,88% dari dana yang dianggarkan.

Untuk melihat capaian indikator kinerja urusan wajib non pelayanan dasar Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Pasaman Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Terpenuhinya ketersediaan pangan minimal terhadap energi dan protein	Ketersediaan energi dan protein a. Ketersediaan energi b. Ketersediaan protein	2.400 kkal/kap/hr 63 gram/kap/hr	3.145 kkal/kap/hr 107 gram/kap/hr	131,04 169,84
			Rata-rata		150,44

2.	Menurunnya tingkat kerawanan pangan	Penurunan Angka Kerawanan Pangan (ARP)	8,44%	8,40%	100,47
3.	Stabilnya harga pangan utama di tingkat produsen dan konsumen	Koefisien keragaman harga pangan (CV) a. Beras b. Cabe Merah	≤ 10 ≤ 25	3,51 42,88	100 28,48
			Rata-rata		64,24
4.	Meningkatnya kualitas dan keberagaman konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78	77,6	99,49
5.	Tersedianya pangan yang segar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat	Persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	76%	86,67%	114,04
	Rata-rata Capaian				105,74

Dari tabel 5 diatas, dari 5 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kabupaten Pasaman pada tahun 2017, hampir keseluruhan indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Rata-rata nilai capaian sebesar 105,74 % dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori **sangat baik**.

Tingkat keberhasilan ketercapaian ini menunjukkan komitmen dan kerjas keras Dinas Pangan Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan dan pengendalian pangan selama tahun 2017.

Tabel 6

Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan Tahun 2017

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator	% Capaian
1.	100%	Sangat Baik	4	100
2.	90% s/d < 100%	Baik		
3.	80% s/d < 90%	Cukup Baik		
4.	60% s/d < 80%	Sedang		
5.	0% s/d 60%	Gagal		
	JUMLAH		4	105,74

Dengan demikian pencapaian urusan Dinas Pangan Kab. Pasaman tahun 2017 dengan predikat sangat baik adalah sebanyak 5 indikator atau 105,74 %, dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pasaman secara umum sudah sangat baik.

Untuk mengetahui perkembangan kinerja maka diperlukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja selama dua tahun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pada tahun mendatang, perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan Tahun 2016 dan Tahun 2017

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			2016	2017
1.	Ketersediaan energi dan protein			
	a. Ketersediaan energi	2.400 kkal/kap/hr	3.145 kkal/kap/hr	3.145 kkal/kap/hr
	b. Ketersediaan protein	63 gram/kap/hr	107,69 gram/kap/hr	107 gram/kap/hr
2.	Penurunan Angka Kerawanan Pangan (ARP)	8,44%	8,40%	8,40%
3.	Koefisien keragaman harga pangan (CV)			
	a. Beras	≤ 10	3,51	3,51
	b. Cabe Merah	≤ 25	42,88	42,88
4.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78	77,6	77,6
5.	Persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	76%	85 %	86,67%

C. Permasalahan dan Solusi

1). Terlaksananya Pendataan Potensi Daerah Rawan Pangan

Permasalahan :

- Masih banyaknya kelompok sasaran dalam penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Pasaman sehingga sulit untuk mengoptimalkan kegiatan
- SKPG (Sistim Kewaspadaan pangan dan Gizi) belum dijadikan acuan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi

Solusi :

- Melakukan koordinasi antar dan dengan instansi terkait (sekolah, kesehatan, organisasi wanita) karena kegiatan penanganan dan pengendalian daerah rawan pangan tidak hanya dilakukan dengan satu sektor atau instansi BP2KP saja tetapi harus dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait.

2). Termanfaatkannya pekarangan sebagai sumber pangan dan pembinaan KWT dan Dasawisma

Permasalahan :

- Belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan lahan pekarangan kebun bibit percontohan yang dibuat
- Kurangnya motivasi masyarakat dalam pengembangan pengelolaan pemanfaatan lahan pekarangan
- Rendahnya animo masyarakat dalam melakukan perubahan-perubahan

Solusi :

- Melakukan pembinaan yang maksimal oleh petugas kabupaten, kecamatan dan penyuluh di lapangan
- Melakukan sosialisasi dan studi banding ke kelompok yang telah berhasil sehingga dapat memberikan motivasi kepada kelompok penerima manfaat
- Penyebaran leaflet/poster/folder

3). Tersedianya dan tersalurkannya cadangan pangan pemerintah daerah kab. pasaman

Permasalahan :

- NIHIL

Solusi :

- Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan penanganan keamanan pangan secara kontinyu

4). Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Desa Mandiri Pangan

Permasalahan :

- Lambatnya perkembangan/kemajuan kelompok Desa Mandiri Pangan
- Kelompok yang bermasalah tidak mau dibina lagi
- Tidak semua bantuan yang diberikan ke kelompok dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan maksimal

Solusi :

- Melaksanakan pembinaan administrasi kepada kelompok/pengurus melalui kunjungan ke kelompok
- Melakukan pembinaan kepada LKD dan TPD
- Melakukan sosialisasi dan studi banding

5). Terlaksananya pembinaan kelompok lumbung pangan, pengadaan cadangan pangan daerah di lokasi lumbung pangan

Permasalahan :

- Administrasi kelompok yang belum tepat, hal ini disebabkan karena belum adanya pelatihan kelompok (anggaran untuk pelatihan belum tersedia)

Solusi :

- Melaksanakan pembinaan administrasi kepada kelompok/pengurus melalui kunjungan ke kelompok
- Melaksanakan studi banding ke kelompok lumbung pangan yang berhasil sehingga dapat memotivasi kelompok dalam mengembangkan kegiatan kelompoknya

- 6). Terlaksananya pembinaan kelompok Tunda Jual, Gapoktan LDPM lama dan baru**
Permasalahan :
- Kurangnya kekompakan antara pengurus dan anggota maupun sesama anggota
 - Kurangnya pengalaman/wawasan pengurus dalam pendistribusian beras/gabah
- Solusi :
- Pembinaan yang lebih intensif pada pengurus kelompok
 - Melakukan sosialisasi mengenai manfaat dari kelompok Tunda Jual dan Gapoktan LDPM Tunda Jual
- 7). Terealisasinya Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)**
Permasalahan :
- Masih kurangnya informasi dan penyerapan teknologi mengenai tata cara pengolahan pangan dan cipta menu B2SA sehingga belum pernah mendapatkan prestasi di Lomba Cipta Menu B2SA di tingkat propinsi
- Solusi :
- Melakukan pembinaan, memberikan motivasi dan meningkatkan kreativitas masyarakat (KWT, Kader PKK) dalam memilih, menentukan, menyusun dan menciptakan menu beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal dengan memanfaatkan potensi pangan yang ada disekitar (pekarangan)
 - Memfasilitasi/memberikan informasi seperti leaflet, poster, brosur mengenai beragam olahan pangan
- 9). Terlaksananya pembangunan gudang sarana dan prasarana lumbung pangan masyarakat**
Permasalahan :
- Lambatnya penetapan kelompok pelaksana karena Juknis terlambat keluar
 - Adanya kelompok yang bagus akan tetapi lokasi yang memadai tidak tersedia
- Solusi :
- Melakukan koordinasi dengan UPT setempat dan tokoh masyarakat dalam memperoleh informasi tentang kelayakan calon lokasi dan calon penerima manfaat (CPCL)
 - Percepatan dalam administrasi persyaratan kontrak
- 10). Terlaksananya penyusunan Buku Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan NBM**
Permasalahan :
- Lambatnya realisasi pelaksanaan kegiatan oleh BPS
- Solusi :
- Melakukan koordinasi yang lebih aktif dalam penjadwalan pelaksanaan kegiatan dengan BPS
- 11). Timbulnya Kesadaran Masyarakat Akan Keamanan Pangan**
Permasalahan :
- Masih kurangnya kepedulian masyarakat mengenai keamanan pangan
 - Rendahnya animo masyarakat dalam melakukan perubahan-perubahan
- Solusi :
- Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan keamanan pangan secara kontinyu
 - Meningkatkan sosialisasi, promosi dan edukasi tentang keamanan pangan
 - Koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan

BAB V.
PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN (DEKONSENTRASI)

A. Tugas Perbantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum

- a. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kegiatan APBN TA. 2017 Kabupaten Pasaman SATKER (018.11.089266)) Nomor Pengesahan : SP DIPA - 018.11.089266/2017 tanggal 7 Desember 2016

2. Instansi pemberi Tugas Perbantuan :

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

3. Program dan Kegiatan

Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan :

- a. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
 - Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Distribusi Pangan.
- b. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
 - Pendampingan kawasan mandiri pangan tahap pengembangan
 - Bansos untuk kelompok mandiri pangan

4. Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi Fisik = 100 %

Realisasi Keuangan = 98,67%

5. Sumber dan Jumlah Dana

Sumber Dana Tugas Perbantuan APBN

Dana Tugas Perbantuan yang digunakan : Rp. 340.510.000,-

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Dukungan dana tidak memadai/ kurang, antara lain tidak tersedianya dana untuk CPCL dan DDRT. Dana pembinaan sangat minim sekali terutama kegiatan LDPM dan KRPL
- Masih diperlukan tambahan dana pendukung kegiatan pertemuan – pertemuan dan pelatihan – pelatihan untuk peningkatan SDM

Solusi

1. Dengan mengadakan pembinaan gabungan. Pada saat pembinaan kegiatan lain dilaksanakan sekaligus pembinaan kegiatan (LDPM maupun KRPL)
2. Mengusulkan tambahan dana pada tahun yang akan datang, antara lain :
 - Untuk CPCL dan Survey DDRT
 - Untuk Pelatihan – pelatihan

B. Tugas Pembantuan Yang diberikan..... (nihil)

BAB VI. PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pasaman sekaligus merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya 'Good Governance' yang memiliki perspektif luas dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.


Realisasi pencapaian target kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Pangan Kabupaten Pasaman memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society yang sekaligus menunjukkan bahwa Dinas Pangan Kabupaten Pasaman ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam rangka penanggulangan permasalahan dan upaya peningkatan pelaksanaan kegiatan, Dinas Pangan Kabupaten Pasaman melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kinerja pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan tujuan secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan pada program dan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi secara optimal serta melakukan upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (instansi terkait, petugas lapangan/penyuluh, masyarakat, dunia usaha)
3. Meningkatkan partisipasi dan motivasi masyarakat terhadap pembangunan pertanian melalui reward dan punishment secara proporsional melalui pelaksanaan lomba antara lain : Lomba Kantin Sekolah Sehat, Cipta Menu B2SA, Penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara.

Dengan demikian segala upaya yang telah dilakukan sebagaimana uraian tersebut diatas menunjukkan adanya suatu keberhasilan terhadap pencapaian Ketahanan pangan masyarakat dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pangan yaitu "Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat"

Lubuk sikaping, Januari 2018
Kepala Dinas Pangan
Kab. Pasaman


Ir. YUSPI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19630522 198903 1 007